

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024

Dhea Intani Permata Dewi¹, Arif Hartono²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: dheaintpd@gmail.com¹, arifhrtn12@gmail.com²

Abstrak: Laporan tugas akhir pada penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan laporan realisasi anggaran. Analisis data dilakukan menggunakan metode efektivitas dan efisiensi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo berhasil mencapai rasio efektivitas sebesar 106,35% yang tergolong sangat efektif, karena realisasi pendapatannya melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas tersebut mampu memaksimalkan pendapatannya dalam mendukung program-program yang telah direncanakan. Namun demikian, rasio efisiensi tercatat sebesar 96,52% yang termasuk dalam kategori kurang efisien yang menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi pemborosan, namun anggaran tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) sangat efektif, dengan realisasi pendapatan yang melebihi target. Namun demikian, efisiensi anggaran masih belum optimal yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaannya. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas antara lain dukungan pemerintah daerah, koordinasi antar instansi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Tantangan terhadap efisiensi di sisi lain terkait dengan birokrasi yang rumit dan perencanaan anggaran yang belum memadai.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Anggaran.

Abstract: The final project report in this study uses data sourced from the Population and Family Planning Control Agency (DPPKB). Data were obtained through observation, interviews, and budget realization reports. Data analysis was conducted using effectiveness and efficiency methods. The study aimed to determine the effectiveness and efficiency of budget management at the Population and Family Planning Control Agency

(DPPKB) of Ponorogo Regency. Based on the effectiveness measurement results, the Population and Family Planning Control Agency (DPPKB) of Ponorogo Regency achieved an effectiveness ratio of 106.35%, which is considered very effective, as its revenue realization exceeded the established target. This indicates that the agency is able to maximize its revenue to support planned programs. However, the efficiency ratio was recorded at 96.52%, which is categorized as less efficient, indicating that although there was no waste, the budget was not optimally utilized. The method used in this study was quantitative descriptive analysis. The research results show that the budget management of the Population and Family Planning Agency (DPPKB) is highly effective, with revenue realization exceeding targets. However, budget efficiency remains suboptimal, indicating challenges in its management. Factors supporting effectiveness include local government support, inter-agency coordination, and competent human resources. Challenges to efficiency, on the other hand, relate to complex bureaucracy and inadequate budget planning.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Budget.*

PENDAHULUAN

Lembaga pemerintah merupakan lembaga yang dimana memiliki wewenang dalam mengelola kebutuhan bangsa dan negara. Sebagai lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan, prioritas utama dari pemerintah adalah bukan mengumpulkan profit, tetapi menyediakan layanan terbaik dan berusaha untuk terus memperbaiki kualitas layanan di masa mendatang (Lisnasari., et al, 2022).

Salah satu unsur pendukung tercapainya suatu tujuan dalam lembaga pemerintah adalah anggaran. Anggaran merupakan dokumen yang merinci langkah-langkah kerja pada suatu instansi, yang dirancang melalui proses yang detail. Anggaran berfungsi sebagai instrumen akuntansi yang membantu para pemimpin dalam menyusun rencana dan mengontrol kegiatan atau operasi lembaga pemerintah (Dwifarchan., et al, 2023).

Pengelolaan anggaran dibutuhkan dalam mengalokasikan anggaran lembaga pemerintah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo yang menjadi bagian dari instansi pemerintah pasti menerapkan pengelolaan anggaran yang dilakukan setiap tahunnya. Pengelolaan anggaran tersebut tentunya memiliki beberapa indikator pengelolaan anggaran terdapat dalam dokumen Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023. Dua indikator pengelolaan anggaran adalah efektivitas dan efisiensi.

Sebuah instansi dianggap efektif jika mampu meraih tujuan serta sasaran yang telah direncanakan sebelumnya, ini menunjukkan yang mana efektivitas selalu berfokus pada kemampuan instansi untuk sukses beradaptasi dengan lingkungan, yang menjadi ciri khas dari organisasi yang efektif (Dwifarchan., et al, 2023). Perhitungan rasio efektivitas adalah dengan membagi realisasi penerimaan anggaran dengan target penerimaan anggaran (Hajar Ibnu., et al, 2023).

Secara umum, efisiensi bisa dipahami sebagai ketiadaan pemborosan. Setiap langkah yang akan diambil untuk mencapai sebuah sasaran yang telah ditetapkan memerlukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan akurat dan benar (Dwifarchan., et al, 2023). Perhitungan rasio efisiensi dengan membagi realisasi belanja dengan realisasi penerimaan anggaran (Hajar Ibnu., et al, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif dan efisien pengelolaan anggaran, dengan mempergunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Judul penelitian yang diambil adalah “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo. Proses pengumpulan data dilakukan hingga tiga bulan, mulai dari April 2025 hingga Agustus 2025 mencakup pengumpulan laporan realisasi anggaran dan anggaran pendapatan tahun 2024, diikuti analisis data dan penyusunan laporan penelitian yang dilaksanakan secara bertahap.

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap topik penelitian atau area tertentu. Tujuan observasi adalah untuk mengumpulkan data mengenai perilaku, peristiwa, atau situasi yang meningkatkan pemahaman mengenai konteks yang sedang diteliti (Iba et al., 2023).

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi langsung oleh peneliti dan responden yang melibatkan tanya jawab. Tujuannya adalah untuk memperoleh wawasan mendalam tentang pemikiran dan pengalaman subjek (Iba et al., 2023).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi mengacu pada pengumpulan data berupa surat-surat, arsip foto, hasil rapat, dan jurnal kegiatan (Ardiansyah et al., 2023). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data laporan keuangan Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo tahun 2024.

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utamanya (Pratiwi et al., 2024). Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dan observasi terhadap staff Dinas PPKB.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah tersedia dan dikumpulkan yang dikumpulkan dari sumber lain (Pratiwi et al., 2024). Data sekunder diperoleh dari anggaran pendapatan, laporan anggaran, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Metode Analisis Data

a. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa baik anggaran diterapkan dalam organisasi. Efisiensi dinyatakan dalam persen (%) semakin rendah nilai rasio, semakin baik pengelolaan anggaran (Tuerah et al., 2022). Rumus efisiensi adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan/Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan Anggaran}} \times 100 \%$$

Sumber: (Hajar Ibnu et al., 2023).

Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria untuk menilai tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

No	Persentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
1	Jika hasil perhitungan lebih dari 100%	Tidak Efisien
2	Jika hasil perhitungan antara 90% hingga 100%	Kurang Efisien
3	Jika hasil perhitungan antara 80% hingga 90%	Cukup Efisien
4	Jika hasil perhitungan antara 60% hingga 80%	Efisien
5	Jika hasil perhitungan dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 (1996).

b. Analisis Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Audit Commission tahun 1986, efektivitas diartikan sebagai penyediaan layanan yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kesesuaian hasil dengan tujuan yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2018). Efektivitas dinyatakan dalam persentase:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Anggaran}}{\text{Target Penerimaan Anggaran}} \times 100 \%$$

Sumber: (Hajar Ibnu et al., 2023).

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

No	Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
1	Jika hasil perhitungan lebih dari 100%	Sangat Efektif
2	Jika hasil perhitungan antara 90% hingga 100%	Efektif
3	Jika hasil perhitungan antara 80% hingga 90%	Cukup Efektif
4	Jika hasil perhitungan antara 60% hingga 80%	Kurang Efektif
5	Jika hasil perhitungan dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 (1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Hitung Efektivitas**

Proses kalkulasi efektivitas dihitung dengan membagi realisasi penerimaan anggaran (dalam rupiah) dengan target penerimaan anggaran (dalam rupiah) yang direncanakan untuk Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, dikalikan dengan 100%. Hasil rasio efektivitas akan didapat dalam bentuk persentase yang akan digolongkan sesuai kriteria efektivitas. Berikut perhitungan rasio efektivitas per-unit belanja tahun anggaran 2024:

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Penerimaan Dinas PPKB
Kabupaten Ponorogo 2024

Uraian	Target Penerimaan 2024	Realisasi Penerimaan 2024	Selisih	Rasio Efektivitas	Keterangan
Belanja Pegawai	Rp 3.015.162.813	Rp 3.083.046.000	Rp 32.016.813	102.25 %	Sangat Efektif
Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.261.267.000	Rp 13.190.900.050	Rp 929.633.050	107.58 %	Sangat Efektif
Jumlah Belanja Operasi	Rp 15.276.429.813	Rp 16.273.946.050	Rp 961.640.860	106.53 %	Sangat Efektif
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1.116.347.200	Rp 1.160.220.000	Rp 43.872.800	103.93 %	Sangat Efektif
Jumlah Belanja Modal	Rp 1.116.347.200	Rp 1.160.220.000	Rp 43.872.800	103.93 %	Sangat Efektif
Total Belanja Daerah	Rp 16.392.777.013	Rp 17.434.166.050	Rp 1.005.513.660	106.35 %	Sangat Efektif

Sumber : RKPD Anggaran Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo, (2024).

Dari tiap unit belanja 2024 Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo, didapatkan kriteria efektivitas **Sangat Efektif** karena realisasi penerimaan anggaran setiap unit belanja di Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo nominalnya di atas target penerimaan anggaran yang direncanakan pada RKPD 2024.

Hasil Hitung Efisiensi

Proses perhitungan efisiensi dilakukan dengan membagi jumlah biaya yang dikeluarkan atau realisasi anggaran yang dibelanjakan realisasi penerimaan anggaran atau anggaran yang tersedia dikalikan dengan 100%. Hasil rasio efisiensi akan didapat dalam bentuk persentase yang akan digolongkan sesuai kriteria efisiensi. Di bawah ini akan dihitung efisiensi pengelolaan anggaran tiap unit belanja dan efisiensi pengelolaan anggaran secara keseluruhan.

Tabel 4.4**Laporan Realisasi Belanja Dinas PPKB 2024**

Uraian	Target Belanja (Penerimaan Anggaran)	Realisasi Belanja	Selisih	Rasio Efisiensi	Keterangan
Belanja Pegawai	Rp 3.083.046.000	Rp 2.872.060.936	Rp 210.985.064	93.16%	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	Rp 13.190.900.050	Rp 12.848.633.456	Rp 342.266.594	97.41%	Kurang Efisien
Jumlah Belanja Operasi	Rp 16.273.946.050	Rp 15.720.694.392	Rp 553.251.658	96.60%	Kurang Efisien
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1.160.220.000	Rp 1.106.960.000	Rp 53.260.000	95.41%	Kurang Efisien
Jumlah Belanja Modal	Rp 1.160.220.000	Rp 1.106.960.000	Rp 53.260.000	95.41%	Kurang Efisien
Total Belanja Daerah	Rp 17.434.166.050	Rp 16.827.654.392	Rp 606.511.658	96.52%	Kurang Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo, (2024).

Dari tiap unit belanja 2024 Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo, didapatkan kriteria Kurang Efisien karena semua unit belanja 2024 rasio efisiensinya antara 90% hingga 100%.

Pembahasan**Efektivitas Pengelolaan Anggaran**

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas bisa diketahui bahwa realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan target anggaran pendapatan yang telah ditentukan, sehingga tingkat efektivitas anggaran yang dicapai oleh Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo adalah sebesar 106,35%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun anggaran 2024, efektivitas pendapatan Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan sangat efektif yang didukung oleh beberapa factor berdasarkan wawancara dengan staff Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo.

Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pengelolaan anggaran di DPPKB adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya dukungan Pemerintah Daerah sebagai penyedia fasilitas dan sumber daya yang memprioritaskan Program Dinas PPKB dengan mengalokasikan anggaran yang cukup
- 2) Koordinasi antara instansi yang baik antara DPPKB dengan dinas lain seperti Dinas Kesehatan, BKKBN, dan lain-lain untuk memastikan sinkronisasi program optimalisasi sumber daya
- 3) Kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten, terlatih, dan termotivasi mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan benar, sehingga meningkatkan efektivitas dan penyerapan anggaran.

Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan kriteria efisiensi, pengelolaan anggaran DPPKB Kabupaten Ponorogo tergolong kurang efisien karena rasio efisiensinya 96.52% yang berarti 96.52% anggaran yang tersedia digunakan untuk belanja dan hanya menyisakan Rp. 606.511.658 dari total anggaran. Pengelolaan anggaran dikatakan efisien apabila rasio efisiensinya sebesar 60%-80% atau penggunaan anggaran untuk dibelanjakan adalah 60% hingga 80% dari total anggaran yang tersedia. Pengelolaan anggaran di DPPKB Kabupaten Ponorogo yang tergolong kurang efisien disebabkan oleh beberapa hal yang dirangkum berdasarkan wawancara dengan staff Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo.

Faktor-faktor penghambat efisiensi pengelolaan anggaran DPPKB dari aspek internal adalah sebagai berikut :

- 1) Alur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dapat menghambat proses pencairan anggaran
- 2) Pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan juga perencanaan anggaran yang kurang matang, tidak realistis, atau tidak sesuai dengan kebutuhan program dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran.

Faktor-faktor penghambat efisiensi pengelolaan anggaran DPPKB dari aspek Eksternal adalah sebagai berikut :

- 1) Perubahan regulasi terkait keuangan daerah
- 2) Pengadaan barang dan jasa, atau program-program tertentu dapat menghambat pelaksanaan program dan menyebabkan inefisiensi
- 3) Perbedaan standar peraturan perundang-undangan pusat dengan kebutuhan daerah
- 4) Petunjuk teknis seperti pengadaan barang yang tidak sesuai atau tidak tersedia di daerah sehingga mempersulit pencairan anggaran
- 5) Sistem birokrasi rumit seperti keterlambatan penetapan Peraturan Menteri yang akan berpengaruh pada penambahan APBD yang telah direncanakan seperti jadwal kegiatan dan anggaran yang mundur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kondisi Efektivitas

Berdasarkan analisis rasio efektivitas, dapat disimpulkan bahwa Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik pada tahun anggaran 2024. Dari rasio efektivitas, capaian rasio sebesar 106,35% menunjukkan realisasi pendapatan melebihi target yang ditetapkan. Rasio efektivitas yang masuk dalam kriteria *sangat efektif* ini didukung oleh beberapa hal seperti dukungan Pemerintah Daerah sebagai penyedia fasilitas, koordinasi terpadu antara Dinas PPKB dengan instansi lain, serta kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini menjadi bukti bahwa Dinas PPKB mampu memaksimalkan potensi pendapatannya, sehingga kinerjanya dapat dikategorikan sangat efektif.

Kondisi Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rasio efisiensi sebesar 96,52%, yang menurut kriteria penilaian masuk dalam kriteria kurang efisien. Meskipun realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah dialokasikan (tidak terjadi pemborosan), namun nilai efisiensi yang mendekati batas atas menunjukkan bahwa anggaran belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh perencanaan anggaran kegiatan yang kurang tepat sehingga berjalan tidak sesuai rencana seperti kegiatan persediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan serta penyediaan bahan logistik kantor yang realisasi belanjanya melebihi rencana anggaran dan tidak adanya pemasukan anggaran selain APBD secara maksimal untuk mendukung pencapaian output dan outcome yang telah diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar efisiensinya dapat ditingkatkan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2023). *Efektivitas dan Efisiensi Anggaran pada Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri*.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2010). *Tentang Penyusunan Rencana Anggaran*.
- Azzahrah. (2025). *Analisis Pengukuran Kinerja Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode (2020-2023)*.
- Cahyani Deswita Dwi, Amalia Gusti Silvana, Putri Julia Aktaviani, Zahira Ananda Alimuddin, F. (2021). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral*. 8(1).
- Dwifarchan Raden Mas Rachmanninditya, Sulistiyanti Umi. (2023). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi anggaran Belanja*. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 1(4), 23-33, <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.1947>.
- Hajar Ibnu, Ijong, Nur Muh, Kalsum Ummy. (2023). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Pemerintah Kota Kendari*. Jurnal JMA (Indonesian Journal of Management and Accounting).
- Iba Zainuddin, Wardhana Aditya. (2023). *Metode Penelitian*, Eureka Media Aksara.

- Listari Lin Ivanda, Harianto Kukuh, Widuri Trisnia. (2022). *Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi dana Desa (2018-2021)*.
- Lisnasari, Guasmin, Haryani Sri. (2022). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset.
- Medindari Kansa Nurul Aini Amelia, Arianto Hafizh Yudha, Wahyuni Cica, Mulyani Ade Sri. (2024). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta*.
- Miralda Salsabila Aisyah, Amanda A, Fakia I, Mariana. (2024). *Evaluasi Kinerja BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Muttaqin Zainal, Sugiharti Kania Dewi, Ilyas Mohammad. (2023). *Diskresi Pengelolaan Anggaran Di Indonesia*. CV. Sketsamedia.
- Oktaviani Nadia Resti, Mulyandani Vina Citra. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020*.
- Pratiwi Riri, Adda Harninda Wahyuni, Anisah, Evrianti Hesti. (2024). *Analisi Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan*.
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 153 Tahun 2021 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang *Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*.
- Susanto Hery. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. *Jurnal Distribusi Ilmu Manajemen dan Bisnis*

Tuerah Aurelia, Manossoh Hendrik. (2022). *Proses Penyusunan dan Pengukuran Efisiensi Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.*